

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI DESA TANJUNG KECAMATAN HAMPARAN RAWANG KOTA SUNGAI PENUH

JEKI RAHMAT PUTRA
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

ABSTRACT

Based on the results of the discussion, the implementation of the flood disaster mitigation policy in Desa Tanjung, kecamatan hamparan rawang, kota sungai penuh has not run optimally, there are still problems and obstacles encountered in this implementation. This is marked by flood disaster prevention, rehabilitation and flood disaster construction. There are still many problems found. The influence of the method used in this research is a qualitative method. Data collection techniques are carried out through interviews and documentation. The key informant in this study is the head of the kota sungai penuh BPBD. full river Mr. Marsal, S.H., M.H, Mrs. Yeni Rospika.S.Sos as the Compiler of the BPBD logistics needs plan for the city of kota sungai penuh, Mr. Guspiarman. S.Ag as head of desa tanjung government service welfare, Mr. Jayusman as chairman of the desa tanjung government agency, Mr. Alimudin. DPT as the lembaga kerapatan adat (LKA) for desa tanjung, Ibuk Ida Murni as the desa tanjung community. The criteria for informants in this study were the desa tanjung government, the Tanjung village village consultative body (BPD), the desa tanjung lembaga kerapatan adat (LKA) and the tanjung dan masyarakat desa tanjung.

Keywords: Policy implementation, flood mitigation.

ABSTRAK

Berdasarkan hasil pembahasan, Implementasi kebijakan mitigasi bencana banjir di desa tanjung kecamatan hamparan rawang kota sungai penuh belum berjalan dengan maksimal masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut. Hal ini ditandai dengan pencegahan bencana banjir, rehabilitasi dan kontruksi bencana banjir masih banyak ditemukan masalah.pengaruh metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.adapun yang menjadi key informan pada penelitian ini adalah ketua BPBD kota sungai penuh bapak Marsal,S.H.,M.H, Ibuk Yeni Rospika.S.Sos selaku Penyusun rencana kebutuhan logistic BPBD kota sungai Penuh, bapak Guspiarman. S.Ag selaku kasi kesejahteraan pelayanan pemerintah desa tanjung, Bapak Jayusman selaku ketua badan pemerintah desa tanjung, bapak Alimudin. DPT selaku lembaga kerapatan adat (LKA) desa tanjung, Ibuk Idamurni selaku masyarakat desa tanjung. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah pemerintahan desa tanjung, badan permusyawaratan desa (BPD) desa tanjung, lembaga kerapatan adat (LKA) desa tanjung dan masyarakat desa tanjung.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, mitigasi banjir.

I. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Kegiatan penanggulangan bencana ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, tapi juga lembaga-lembaga lain yang ikut membantu dalam mitigasi dalam bencana seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bahkan masyarakat pun juga ikut dalam usaha mengurangi resiko bencana.

Mitigasi bencana merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mengurangi dampak yang terjadi akibat bencana. Usaha pengurangan resiko bencana ini melibatkan berbagai pihak yang sangat terkait dengan bencana. Pihak-pihak tersebut adalah pemerintah, LSM, masyarakat dan lembaga lainnya yang ikut membantu dalam mengurangi resiko bencana. Mitigasi bencana diterapkan, guna untuk mengurangi atau memperkecil dampak dari bencana. Mitigasi perlu dilakukan untuk mengurangi resiko dari bencana serta bisa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat serta organisasi dalam mengantisipasi bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Menurut Nurjanah,2013. Bencana alam khususnya bencana banjir merupakan bencana dengan jumlah kejadian yang sangat besar serta menyebar di hampir seluruh wilayah. Banjir adalah limpahan air yang melebihi tinggi muka air normal, sehingga melimpah dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah di sisi sungai. Banjir disebabkan oleh curahan hujan yang berlebih sehingga menyebabkan sungai meluap ke daratan. Tidak adanya daerah resapan yang disebabkan oleh hutan gundul, penyempitan serta pendangkalan sungai mempengaruhi arus air sungai dari hulu ke hilir sehingga menyebabkan bencana banjir. Bukan hanya itu, sistem irigasi yang tidak baik serta penyumbatan oleh sampah pada aliran sungai dan irigasi membuat aliran air menjadi terhambat, hal ini merupakan fenomena ulah dari manusia yang tidak menjaga lingkungan sekitar dengan baik.

Dalam Pembagian Tanggung Jawab Penanganan Bencana pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB (Badan Nasional, Penanggulangan Bencana Nasional) lembaga usaha, dan lembaga internasional adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. Sedangkan di daerah, penanggulangan bencana di atasi oleh BPBD (Badan penanggulangan bencana Daerah).

Begitu juga dalam Wilayah Kota Sungai Penuh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh, Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2019 tentang penanggulangan bencana daerah pada

Bab 1 Pasal 1 Ayat (7) yang berbunyi “Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang disingkat BPBD adalah Badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah kota sungai penuh.” Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, Perda ini diharapkan menjadi solusi dalam penanggulangan bencana yang mungkin terjadi di wilayah kota sungai penuh. Namun demikian sejak perda tersebut dilahirkan 4 tahun yang lalu bencana banjir masih kerap terjadi hingga kini.

Agar bencana banjir tersebut dapat diatasi dan ditanggulangi perlunya implementasi kebijakan dan juga penanganan yang baik dan juga kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam upaya untuk mengurangi resiko atau memperkecil resiko yang akan di timbulkan dari bencana banjir yang terjadi desa tanjung kecamatan hamparan rawang kota sungai penuh.

Yang menjadi Fenomena dalam penelitian ini adalah :

1. Kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintahan desa kebijakan dalam mitigasi banjir.
2. Kurangnya normalisasi sungai pada sungai batang mero.
3. Proses tanggap darurat dan pasca banjir tidak berjalan dengan baik dan juga tidak melaksanakan perbaikan infrastruktur yang mengakibatkan Masyarakat desa tanjung masih belum terbebas dari banjir.

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk memilih judul penelitian yaitu **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI DESA TANJUNG KECAMATAN HAMPARAN RAWANG KOTA SUNGAI PENUH”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka dapat diidentifikasi masalah banjir di desa tanjung kecamatan hamparan rawang kota sungai penuh yaitu:

1. Kurangnya penanganan tim Badan penanggulangan bencana daerah dalam mengatasi banjir di Desa Tanjung Kecamatan Hamapran Rawang Kota Sungai Penuh.
2. Kurangnya partisipasi pemerintah dalam mitigasi bencana banjir yang terjadi di Desa Tanjung Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.
3. kurangnya kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam upaya mengurangi atau memperkecil resiko yang akan ditimbulkan dari banjir yang terjadi di desa tanjung kecamatan hamparan rawang kota sungai penuh.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bencana

Bencana pada umumnya merefleksikan karakteristik tentang gangguan terhadap pola hidup manusia, dampak bencana bagi manusia, dampak terhadap struktur sosial, kerusakan pada aspek sistem pemerintahan, bangunan, dan lain-lain serta kebutuhan masyarakat yang diakibatkan oleh bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 Angka 1 bencana adalah : “Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang di sebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.”

Jenis-Jenis Bencana

Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana dibagi atas tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

- a) Bencana alam Bencana yang bersumber dari fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, angin topan, dll.
- b) Bencana non alam Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, pandemi, dan wabah penyakit.
- c) Bencana sosial Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas, dan terorisme.

Dampak Bencana

Menurut (Nurjanah dkk, 2013 : 32) Beberapa dampak bencana alam adalah sebagai berikut :

1. korban jiwa
Seringkali manusia tidak bersiap siaga menghadapi bencana alam. Akibatnya bencana alam seringkali menelan korban jiwa seperti :
 - a) Ada yang terbawa hanyut aliran air ketika banjir.
 - b) Ada yang meninggal akibat tersapu tsunami.
 - c) Ada yang cacat akibat terkena reruntuhan bangunan ketika gempa bumi.
2. Rasa trauma pada korban yang selamat
Bencana alam sering datang secara tiba-tiba. Bagi mereka yang selamat, berjuang agar tetap dapat hidup melawan bencana alam adalah pengalaman yang meninggalkan trauma. Trauma adalah rasa takut yang sangat dalam.
3. Kerugian harta benda
Dampak bencana alam terhadap harta benda antara lain :
 - a) Bencana alam sering menimbulkan kerusakan rumah.
 - b) Ketika banjir terjadi banyak barang-barang yang terbawa hanyut.
 - c) Tsunami menghancurkan banyak rumah sampai batas rumah pun tidak ada.

4. Kerusakan lingkungan
Bencana alam seringkali terjadi secara meluas. Coba kita perhatikan ketika banjir terjadi. Pasti air banjir yang menyebar luas keberbagai daerah. Ketika tsunami terjadi maka bukan hanya melanda daerah sekitar pantai namun daerah lain pun terimbas tsunami. Setelah bencana alam terjadi biasanya lingkungan menjadi rusak. Ekosistem di lokasi bencana alam terganggu. Habitat atau tempat hidup hewan dan tumbuhan menjadi hilang. Tanaman banyak yang roboh. Hewan banyak yang mati. Sumber air menjadi kotor.
5. Musnahnya hewan atau tumbuhan tertentu
Beberapa jenis hewan dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup setelah terjadi bencana alam. Sumber air alami menjadi berkurang sehingga hewan dan tumbuhan menjadi mati.

Tujuan Penanggulangan Bencana

Menurut Keputusan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana.

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

1. Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat Dari Ancaman Bencana
2. Menjamin Terselenggaranya Penanggulangan Bencana Secara Terencana, Terpadu, Terkoordinasi, Dan Menyeluruh
3. Menghargai Budaya Lokal
4. Membangun Partisipasi Dan Kemitraan Publik Serta Swasta
5. Mendorong Semangat Gotong Royong, Kesetiakawanan Dan Kedermawanan
6. Menciptakan Perdamaian Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara.

Tahapan Penanggulangan Bencana

Menurut Keputusan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi :

1. Prabencana
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a) Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana
 - b) Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana.
2. Tanggap Darurat
 - a) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat Sebagaimana Dimaksud Meliputi:
 1. Pengkajian Secara Cepat Dan Tepat Terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian Dan Sumber Daya
 2. Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
 3. Penyelamatan Dan Evakuasi Masyarakat Yang Terkena Bencana
 4. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana
 5. Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan;
 6. Pemulihan Dengan Segera Prasarana Dan Sarana Vital.

- b) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikendalikan oleh Kepala BPBD.
3. Pasca Bencana
- Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Pasca Bencana Sebagaimana Dimaksud Meliputi:
- a) Rehabilitasi
Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca Bencana..
 - b) Rekonstruksi.
Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca Bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat Kualitatif dengan menggunakan Metode Deskriptif. Sehingga penulis ini akan mendeskripsikan bagaimana analisis penanggulangan bencana banjir oleh badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kota sungai penuh, hambatan yang ditemui dalam mewujudkan pelaksanaan pemilihan serentak dan upaya dalam penyelesaiannya. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.

Menurut Sugiyono (2019,18), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Informan Penelitian

Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik purposive sampling. Menurut sugiyono (2019:54) dalam buku metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi social yang diteliti.

Menurut sugiyono (2019:145), untuk memilih informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Subjek yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses ekulturasi sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati.
2. Subjek yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Subjek yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi.
4. Subjek yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena yang menjadi fokus penelitian. (Sugiyono, 2019:297)

2. Wawancara

Menurut sugiyono, (2019:304) wawancara merupakan penentuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan maksa dalam suatu topic tertentu. Objek penelitian ini menggunakan teknik wawancara tak berstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi yang dimaksud adalah meliputi struktur organisasi, laporan pembelian, catatan persediaan, dan laporan pembelian yang dilakukan pada perusahaan tersebut serta kegiatan peneliti saat melakukan observasi dan wawancara. (Sugiyono, 2019:314)

Alat-alat wawancara

Menurut sugiyono, (2019:313) supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan alat-alat sebagai berikut.

- a. Buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data, dan sekarang sudah banyak computer yang kecil, notebook yang dapat digunakan untuk membantu mencatat data hasil wawancara.

- b. Handphone (HP), berfungsi untuk merekam semua percakapan atas pembicaraan. Penggunaan handphone dalam wawancara perlu memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.
- c. Camera, untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data.

Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan juga dokumentasi kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles and Huberman (1984) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. (Sugiyono, 2019:321)

1. Data Collection/Pengumpulan

Data Dalam penelitian kualitatif pengumpulan datanya dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, atau gabungan ketiganya (triangulasi). (Sugiyono, 2019:322)

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti. (Sugiyono, 2019:323)

3. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Namun, Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. (Sugiyono, 2019:325)

4. Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Teknik Keabsahan data

Teknik keabsahan data pada penelitian ini dengan menggunakan Triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, sugiyono (2019:68). Macam-macam Triangulasi sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda.

Unit analisis

Unit analisis adalah satuan yang akan diteliti dapat berupa individu, kelompok social, lembaga, dan komunitas. Sehubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi unit analisis adalah Analisis Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengenalan dan pemantauan resiko bencana.

dalam pengenalan dan pemantauan resiko terjadi nya banjir di desa tanjung ini, kita perlu mempersiapkan tembok penahan dan juga menyediakan pasir yang telah dimasukkan kedalam karung sehingga memperlambat air menggenangi rumah warga di desa tanjung.

2. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana.

dalam perencanaan partisipatif penanggulangan bencana yang ada di desa tanjung akan di buat atau di bangun kembali tanggul penahan sehingga lebih kokoh lagi dan juga akan membuat aliran air sungai tersebut mengalir ke dua arah yaitu ke sungai kecil yang ada di desa simpang tiga rawang.

3. Pembangunan budaya dasar sadar bencana

Pengembangan budaya sadar bencana di desa tanjung masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah desa dan juga pemerintah daerah dalam mencari solusi yang tepat untuk mengangani masalah banjir ini dan juga masyarakat diminta agar tidak membuang limbah maupun sampah sepanjang aliran sungai batang meroa agar merkecil potensi terjadinya banjir di desa tanjung.

4. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya.

dalam pengkajian kerusakan dan kerugian masyarakat selama banjir megenangi rumah warga, kerugian dilihat dari rusaknya rumah warga yang terkena banjir sehingga membuat rumag lembap dan belum dilihat kerusakan lain juga yang dialami sperti terendamnya tempat tidur masyarakat, dan kerugian ekonomi yang menyulitkan mayarakat terhambat dalam melakukan aktivitas.

5. Penyelamatan dan evaluasi masyarakat yang terkena bencana

bahwa pada saat penyelamatan dan evaluasi banjir di desa tanjung, pemerintah daerah menyiapkan tenda agar bisa membantu mayarakat untuk beristirahat hingga banjir menyusut dari rumah warga yang ada di desa tanjung.

6. Pemantauan kebutuhan dasar bagi korban banjir

dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga yang terkena banjir di desa tanjung sudah disiapkan seperti makanan dan obat-obatan yang di sediakan.

7. Rehabilitas

rehabilitasi setelah terjadinya banjir di desa tanjung, masyarakat melakukan pembersihan rumah masing-masing maupun gotong royong bersama.

V. KESIMPULAN

1. Pengenalan dan pemantauan resiko bencana.
Disimpulkan bahwa, dalam pengenalan dan pemantauan resiko terjadinya banjir di desa tanjung ini, kita perlu mempersiapkan tembok penahan dan juga menyediakan pasir yang telah dimasukkan kedalam karung sehingga memperlambat air menggenangi rumah warga di desa tanjung.
2. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana.
Kesimpulan, dalam perencanaan partisipatif penanggulangan bencana yang ada di desa tanjung akan di buat atau di bangun kembali tanggul penahan sehingga lebih kokoh lagi dan juga akan membuat aliran air sungai tersebut mengalir ke dua arah yaitu ke sungai kecil yang ada di desa simpang tiga rawang.
3. Pembangunan budaya dasar sadar bencana
Pengembangan budaya sadar bencana di desa tanjung masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah desa dan juga pemerintah daerah dalam mencari solusi yang tepat untuk mengangani masalah banjir ini dan juga masyarakat diminta agar tidak membuang limbah maupun sampah sepanjang aliran sungai batang meroa agar merkecil potensi terjadinya banjir di desa tanjung.
4. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya.
Disimpulkan bahwa, dalam pengkajian kerusakan dan kerugian masyarakat selama banjir megenangi rumah warga, kerugian dilihat dari rusaknya rumah warga yang terkena banjir sehingga membuat rumag lembap dan belum dilihat kerusakan lain juga yang dialami seperti terendamnya tempat tidur masyarakat, dan kerugian ekonomi yang menyulitkan mayarakat terhambat dalam melakukan aktivitas.
5. Penyelamatan dan evaluasi masyarakat yang terkena bencana
Dapat disimpulkan bahwa pada saat penyelamatan dan evaluasi banjir di desa tanjung, pemerintah daerah menyiapkan tenda agar bisa membantu mayarakat untuk beristirahat hingga banjir menyusut dari rumah warga yang ada di desa tanjung.
6. Pemantauan kebutuhan dasar bagi korban banjir
Kesimpulan, dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga yang terkena banjir di desa tanjung sudah disiapkan seperti makanan dan obat-obatan yang di sediakan.
7. Rehabilitas
Disimpulkan, dalam rehabilitasi setelah terjadinya banjir di desa tanjung, masyarakat melakukan pembersihan rumah masing-masing maupun gotong royong bersama.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abidin (Tahir, 2014:57) Pengertian implementasi kebijakan

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2012, Modul Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana. Team BNPB. Jakarta.
- G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondineli (dalam subarsono 2005: 101) Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan
- Grindle Waluyo, (2007:49) Pengertian implementasi kebijakan
- IDEP. Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat. Bali: IDEP; 2007
- Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandin(2009:12) Pengertian kebijakan KBBI (Kamus besar bahasa Indonesia) pengertian implementasi
- Mazmanian dan sebatierwaluyo (2007:49) Pengertian implementasi
- Menurut kinerja BNPB TAHUN 2020 Indikator penanggulangan bencana Migitasi
- Mulyadi (2015:12) Pengertian implementasi
- Murdiyanto, & Gutomo, T. (2015). Bencana Alam Banjir Dan Tanah Longsor Dan Upaya Masyarakat Dalam Penanggulangan. Jurnal PKS, 14(4), 437–452.
- Niode, D. F. Rindengan, Y.D. Karou,(2016) Pengertian mitigasi
- Nurjanah, dkk (2013 : 20-32) Manajemen Bencana Bandung: ALFABETA
- Rahayu. DAKK. (2009). Banjir dan upaya Penanggulanganya. Bandung : Pusat
- Sugiyono,2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Penerbit Alfabeta
- William N.Dunn. (2003) Tahap-tahap pembuatan kebijakan
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh